



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintahan Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1035,2016);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik di Pencipta Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Arsip Vital;
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2010, tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66 );

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98 );
24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan
7. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota
8. Naskah dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan mempunyai nilai arsip.
9. Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat.
10. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
11. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilitatif keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerjasama, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika/SIM/TIK, pengawasan dan perlengkapan

12. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif bidang pembinaan kearsipan, konservasi arsip, pendidikan dan pelatihan kearsipan, akreditasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan serta jasa kearsipan.
13. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
15. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan /atau lembaga kearsipan.
16. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
17. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Arsip Nasional Republik Indonesia yang meliputi pembinaan kearsipan, konservasi arsip, pendidikan dan pelatihan kearsipan, akreditasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan serta jasa kearsipan.
18. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang meliputi keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan kerjasama, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika/SIM/TIK, pengawasan dan perlengkapan.

## **BAB II**

### **SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

#### **Pasal 2**

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan sarana Perangkat Keras (*hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*).
- (2) Perangkat Keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
- b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

### **BAB III ARSIP DINAMIS**

#### **Pasal 3**

Arsip dinamis Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi menjadi tiga (3) kategori yang meliputi:

- a. biasa/umum/terbuka;
- b. terbatas; dan
- c. rahasia

#### **Pasal 4**

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

- a. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat, Bagian, Bidang ; dan
- b. arsip dinamis dari lingkungan Inspektorat.

#### **Pasal 5**

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang meliputi: Arsip Nasional Republik Indonesia

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan BAPERJAKAT, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran disetiap unit kerja; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

#### **Pasal 6**

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari Kepegawaian dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari Sekretariat atau Bagian Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; dan
- c. arsip dinamis yang tercipta dari Pusat Jasa Kearsipan seperti strategi pemasaran.

**BAB IV  
PENGAMANAN ARSIP**

**Pasal 7**

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

**Pasal 8**

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

**Pasal 9**

Tabel Klasifikasi Keamanan Dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Maret 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
AKSES ARSIP DINAMIS

**I. UMUM**

<b>NO.</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR KEAMANAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>000</b>	<b>UMUM</b>				
	001	Lambang - Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Propinsi - Kota/Kabupaten	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	002	Penghargaan - Bintang - Satya Lencana	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samkarya Nugraha</li> <li>- Monumen</li> <li>- Penghargaan secara adat</li> <li>- Penghargaan lainnya</li> </ul>				
	003	Hari Raya/ Besar <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb</li> <li>- Keagamaan- Idul Fitri- Natal dll</li> <li>- Hari Ulang Tahun ( HUT )</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	004	Ucapan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ucapan Terima kasih</li> <li>- Ucapan Selamat</li> <li>- Ucapan Belasungkawa</li> <li>- Ucapan lainnya</li> </ul>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	006	Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
<b>2</b>	<b>010</b>	<b>URUSAN DALAM</b>				
	011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	012	Rumah Dinas - Tanah untuk rumah dinas - Perabotan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	013	Mess/ Guest House	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	014	Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	016	Telepon/Faximili/Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	019	Protokol - Upacara Bendera - Tata tempat - Pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden - Audiensi - Alamat-alamat Kantor dan Pejabat - Sambutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
3	020	<b>PERALATAN</b> -Penawaran, Ekspose	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	023	Pejabat Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	028	Inventaris	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
<b>4</b>	<b>030</b>	<b>KEKAYAAN DAERAH</b>				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	<b>040</b>	<b>PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI</b>				
	041	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi -Foto - Audio - Video	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	045	Kearsipan - Pola Klasifikasi - Penataan Berkas - Penyusutan Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan/perawatan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi - Peralatan -Sistem -Sumber Daya Manusia -Pembinaan Persandian	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
<b>6</b>	<b>050</b>	<b>PERENCANAAN</b>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Sub. Bag., Sub Bid,

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- REPELITA</li> <li>- Pelita Daerah</li> <li>- Bantuan Pembangunan Daerah</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Perencanaan/ Proyek bidang peralatan</li> <li>- Bidang Perpustakaan</li> <li>- Bidang Kearsipan</li> <li>- Bidang Sandi</li> <li>- Organisasi/ Ketatalaksanaan</li> <li>- Penelitian</li> </ul>			<p>Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja</p>	Sub Bag.
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	052	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Penmgawasan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>7</b>	<b>060</b>	<b>ORGANISASI/KETATALAKSANAAN</b>				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	061	Organisasi pemerintah - Sususnan dan tata kerja - Tata tertib Kantor, jam kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	065	Ketatakasnaan/ tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	068	Komputerisasi/Siskomendagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>8</b>	<b>070</b>	<b>PENELITIAN</b>				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	075	Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	076	Non Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	078	Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>9</b>	<b>080</b>	<b>KONFERENSI</b>				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	083	Komponen eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
10	090	<b>PERJALANAN DINAS</b>				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi ( Pejabat Eselon I )	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	097	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

## II. PEMERINTAHAN

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	130	<b>PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	131	Bupati/walikota meliputi				
		-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki Dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Meninggal,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Memori Kepala Daerah,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	131	Sambutan/Pengarahan/Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	132	Wakil Bupati/Walikota meliputi				
		-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	133	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota meliputi :				
		-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		-meninggal	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Muspida	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum BAN (Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum Koordinasi lainnya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Kabupaten/Kota	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
135		Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
136		Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
137		Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
138		Pemerintah Wilayah Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/Pengarahan/Amanat	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
139		Laporan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		Monitoring	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>2</b>	<b>140</b>	<b>PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b>				
	141	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/kelurahan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	146	Kewilayahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Nama Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Desa/kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan perinciannya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
		Kepala Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
		Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
		Staf Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
		Rukun Tetangga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
		Rukun Warga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
<b>3</b>	<b>170</b>	<b>DPRD KABUPATEN/KOTA</b>					
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					mengganggu kinerja	
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
172		Persidangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
173		Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>4</b>	<b>180</b>	<b>HUKUM</b>				
		Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Dasar hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Tanah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rumah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Utang/Piutang	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Gadai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Hipotik	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Notariat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
182		Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
183		Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Bantuan hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
184		Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
185		Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		Exit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Lintas Batas/Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	186	Rumah Tahanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	187	Kejaksaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		Keputusan Bupati/Walikota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	197	Kerjasama dengan Lembaga Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

## II. POLITIK

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	<b>POLITIK</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Umum</li> <li>- Orde Baru</li> <li>- Reformasi</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					kerja	
	201	KEPARTAIAN Meliputi : pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembubaran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		- lambang Partai - Kartu Tanda Anggota - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		- Bantuan keuangan Parpol - Rapat Koordinasi konsolidasi partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
<b>2</b>	<b>220</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>				
	222	- Berdasarkan Kekaryaannya - Kekaryaannya Pepabri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Kekaryaan Wredatama			pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	223	- Berdasarkan Kerohanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	224	Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
<b>3</b>	<b>230</b>	<b>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</b>				
	231	Ikatan Dokter Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	232	Persatuan Guru Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	234	Persatuan Advokat Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	236	Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	237	Persatuan Wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	238	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	239	Organisasi Profesi dan fungsional lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					unit kerja	
4	240	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>				
	241	Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	242	Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	243	Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	244	Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
5	250	<b>ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN</b>				
	251	Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	252	Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					unit kerja	
	254	Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	255	Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
<b>6</b>	<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>				
	261	Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	262	Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	263	Pemberdayaan Perempuan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	264	Kongres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	265	Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
7	270	<b>PEMILIHAN UMUM</b>					
	271	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	272	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	273	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	274	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	275	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	276	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana</li> <li>- Sarana T P S</li> <li>- Sarana kendaraan</li> <li>- Surat suara</li> <li>- Kotak suara</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis
	277	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	278	Pengambilan sumpah/janji anggota MPR,DPR,DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
<b>8</b>	<b>280</b>	<b>PILKADA</b>				
	281	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	282	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	283	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					tugas perangkat daerah unit kerja	
	284	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	285	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	286	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana</li> <li>- Sarana TPS</li> <li>- Sarana kendaraan</li> <li>- Surat suara</li> <li>- Kotak suara</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	287	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	288	Pengambilan sumpah/janji anggota MPR,DPR,DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
9	290	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM/ BAWASLU</b>				
	291	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

### III. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	<b>KEAMANAN/KETERTIBAN</b>				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	301	Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	P S K	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	304	Gepeng	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
					unit kerja		
	305	P P N S	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
<b>2</b>	<b>310</b>	<b>PERTAHANAN</b>					
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggunan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Bidang, Seksi, SuBag	
	312	Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Bidang Teknis	

<b>NO.</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS ARSIP</b>	<b>KLASIFIKASI KEAMANAN</b>	<b>HAK AKSES</b>	<b>DASAR KEAMANAN</b>	<b>UNIT PENGOLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	313	Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	314	Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
<b>3</b>	<b>320</b>	<b>KEMILITERAN</b>				
	321	Latihan Militer	terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	322	Wajib Militer	terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	324	Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	325	Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
<b>4</b>	<b>330</b>	<b>KEAMANAN</b>				
	331	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	332	Huru hara/ demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					Kab. Kotawaringin Barat	
	333	Senjata api/ senjata tajam	terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggung keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	336	Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					unit kerja	
	338	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	<b>340</b>	<b>PERTAHANAN SIPIL</b>				
	341	Perlindungan Masyarakat ( Linmas )	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
<b>6</b>	<b>350</b>	<b>KEJAHATAN</b>				
	351	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat.	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
	336	Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah nit kerja	Bidang Teknis	
	337	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	338	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
<b>5</b>	<b>340</b>	<b>PERTAHANAN SIPIL</b>					
	341	Perlindungan Masyarakat ( Linmas )	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
<b>6</b>	<b>350</b>	<b>KEJAHATAN</b>					

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	351	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ✓	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ✓	Bidang Teknis
	354	Subversi/Penyelundupan/Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan Terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ✓	Bidang Teknis
	355	Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ✓	Bidang Teknis
	356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapatb mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					unit kerja	
	357	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	358	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	359	Kajahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	361	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	362	Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	363	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	Kebakaran - Pembinaan, - Penanggulangan, - Pencegahan - Pemadaman - Pengujian instalasi - Antisipasi - Proteksi, APAR - Kebutuhan sarpras	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	370	<b>KECELAKAAN SAR</b>	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	372	U d a r a	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	373	L a u t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	376	Sungai / danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

IV. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
1	400	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	402	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	403	Raskin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	404	Askeskin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	405	Jamkessos/Jamkesda	Biasa/	Eselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Terbuka		dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
<b>2</b>	<b>410</b>	<b>PEMBANGUNAN DESA/KELUARAHAAN</b>				
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
		a. Swadaya Gotong Royong 1) Penataan gotong royong 2) Gotong royong dinamis 3) Gotong royong statis 4) Pungutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Lembaga Sosial Desa (LSD) 1) Pembinaan, 2) Klasifikasi, 3) Proyek, 4) Musyawarah desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Latihan Kerja Masyarakat	Biasa/	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Kader masyarakat, 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN), 3) Pusat latihan, 4) Kursus-kursus, 5) Kurikulum/syllabus, 6) Keterampilan, 7) Pramuka	Terbuka		yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		d.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.Keluarga (PKK) 1) Program, 2) Pembinaan organisasi, 3) Kegiatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g.Penyuluhan 1) Publikasi, 2) Peragaan,	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3) Sosio drama, 4) Siaran pedesaan, 5) Penyuluhan lapangan				
		h. Kelembagaan Desa 1) Kelompok tani, 2) Rukun tani 3) Subak 4) Dharma Tirta	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	<b>412</b>	<b>PEREKONOMIAN DESA</b>				
		a. Produksi Desa 1) Pengolahan 2) Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Keuangan Desa 1) Perkreditan desa, 2) Inventarisasi data, 3) Perkembangan/pelaksanaan, 4) Bantuan/stimulans 5) Petunjuk/pembinaan pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Koperasi Desa	Biasa/	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Badan Usaha Unit Desa(BUUD) 2)Koperasi Unit Desa (KUD)	Terbuka		yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		d.Penataan Bantuan Pembangunan Desa 1)Jumlah desa yang diberi bantuan, 2)Pengarahan 3)Pusat 4)Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e. Alokasi Bantuan Pembangunan Desa 1)Pusat 2)Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.Pelaksanaan BantuanPembangunan Desa 1)Bantuan langsung, 2)Bantuan keserasian, 3)Bantuan juara lomba desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Biasa/	Eselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Mandiri (PNPM)  Berkas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)	Terbuka		dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
	<b>413</b>	<b>PRASARANA DESA</b>				
		a. Prasarana Desa 1) Pembinaan 2) Bimbingan teknis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Pemukiman Kembali Penduduk 1) Lokasi, 2) Diskusi 3) Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Masyarakat Pradesa 1) Pembinaan 2) Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa 1) Rumah sehat, 2) Proyek perintis, 3) Pelaksanaan, P	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Pengembangan 5) Perbaikan kampung				
	<b>414</b>	<b>PENGEMBANGAN DESA</b>				
		a. Tingkat Perkembangan Desa 1) Jumlah desa, 2) Pemekaran desa, 3) Pembentukan desa baru, 4) Evaluasi, 5) Bagan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) 1) Penyuluhan program, 2) Lokasi UDKP, 3) Pelaksanaan, 4) Bimbingan/pembinaan, 5) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Tata Desa 1) Inventarisasi,	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2)Penyusunan pola tata desa, 3)Aplikasi tata desa, 4)Pemetaan, 5)Pedoman pelaksanaan, 6)Evaluasi			mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		d.Perlombaan Desa 1) Pedoman, 2)Penilaian, 3)Kejuaraan, 4)Piagam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	<b>415</b>	<b>KOORDINASI</b>				
		a.Sektor Khusus Berkas tentang koordinasi sector khusus-di Pemerintah Kota Yogyakarta	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) Berkas tentang rapat koordinasi ahorizontal dengan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		lembaga di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta			yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		c.Tim Koordinasi Pusat (TKP) Berkas tentang tim koordinasi pusat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.Kerjasama 1) Luar negeri (UNICEF), 2) Perguruan tinggi, 3) Departemen/lembaga non	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>3</b>	<b>420</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				
	421	<b>SEKOLAH</b>				
		a.Pra Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.Sekolah Dasar/Sederajat	Biasa/	Eselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Terbuka		dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		c.Sekolah Menengah/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.Sekolah Tinggi/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.Sekolah Kejuruan/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g.Kegiatan Pelajar 1) Reuni, darmawisata, 2)Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), 3)Pelajar teladan, dan 4)Resimen Mahasiswa (MENWA)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		h.Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		i.Pendidikan Luar sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	422	ADMINISTRASI SEKOLAH				
		a.Persyaratan Masuk Sekolah, testing, Ujian, Pendaftaran,Mapras, Perpeloncoan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					OPD/unit kerja	
		b.Tahun Pelajaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.Hari Libur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.Uang Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.Bea Siswa	Biasa/	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
			Terbuka		mengganggu kinerja OPD/unit kerja		
		f.Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	423	METODE BELAJAR					
		a.Kuliah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		b.Ceramah, simposium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		c.Diskusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d.Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.Kurikulum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.Karya Tulis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g.Ujian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	424	TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector dan guru teladan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					OPD/unit kerja	
	425	SARANA PENDIDIKAN				
		a.Gedung 1) Gedung sekolah, 2) Kampus 3) Pusat kegiatan mahasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.Buku Berkas tentang buku pelajaran dan diktat kuliah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		c.Perengkapan Sekolah Berkas tentang perlengkapan sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	426	KEOLAHRAGAAN				
		a. Cabang Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		b. Sarana Biasa/ Terbuka 1) Gedung olah raga, 2) Stadion, 3) Lapangan, 4) Kolam renang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Pesta Olah raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. KONI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	427	KEPEMUDAAN				
		Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
		gelanggang remaja			mengganggu kinerja OPD/unit kerja		
	428	KEPRAMUKAAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	429	PENDIDIKAN KEDINASAN DEPDARGI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	430	KEBUDAYAAN KESENIAN					
		a.Cabang Kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		b.Sarana Berkas tentang gedung kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
	431	KEPURBAKALAN				
		a.Museum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.Peninggalan Kuno 1) Candi, termasuk pemugaran 2) Benda peninggalan kuno	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	432	SEJARAH	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	433	BAHASA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					OPD/unit kerja	
	434	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENYANGAN Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	435	KEPERCAYAAN Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	<b>436</b>	<b>KESEHATAN</b>				
	437	PEMBINA KESEHATAN				
		a.Gizi b.Mata c.Jiwa d.Kanker e.Usaha Kesehatan Sekolah f.(UKS) Perawatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g.Penyuluhan Kesehatan h.Masyarakat (PKM) i.Pekan Imunisasi Nasional				
	438	OBAT-OBATAN				
		a.Pengadaan b.Penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	439	PENYAKIT MENULAR				
		a.Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) 1)Kusta 2)Kelamin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3)Frambosia 4)TBC/AIDS/HIV			OPD/unit kerja	
		c.Epidemilogi dan Karantina (Epidka) 1)Kholera 2)Imunisasi 3)Survailense 4)Rabies/anjing gila, Antraks	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) 1)Malaria 2)Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF) 3)Filaria 4)Serangga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.Hygiene Sanitasi 1)Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		makanan dan minuman (TPPMM) 2) Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) 3) Pestisida			OPD/unit kerja	
	440	GIZI				
		a.Kekurangan Makanan,Bahaya Kelaparan, Busung Lapar b.Keracunan Makanan c.Menu Makanan Rakyat d.Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) e.Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	441	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					kerja	
	442	TENAGA MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	443	ALAT MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	444	<b>PENGOBATAN TRADISIONAL</b>				
		a.Pijat b.Tusuk jarum c.Jamu tradisional/herbal d.Dukun/paranormal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>6</b>	<b>450</b>	<b>AGAMA</b>				
	451	ISLAM				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Peribadatan 1) Sholat 2) Zakat, Fitrah 3) Puasa 4) MTQ	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Rumah Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Tokoh Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pendidikan 1) Tinggi 2) Menengah 3) Dasar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Pondok Pesantren 5) Gedung Sekolah 6) Tenaga Pengajar 7) Buku 8) Dakwah 9) Organisasi/Lembaga Pendidikan 10) TPA/TQA/TPQ				
		e. Harta Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Peradilan	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Organisasi Keagamaan Bukan Politik. Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					kinerja OPD/unit kerja	
		h.Mazhab	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	452	KRISTEN PROTESTAN				
		a.Peribadatan b.Rumah ibadah c.Tokoh agama, rohaniawan,pendeta, domine d.Mazhab e.Organisasi gerejani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	453	KATHOLIK				
		a.Peribadatan b.Rumah ibadah c.Tokoh agama, rohaniawan, pastor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d.Mazhab e.Organisasi gerejani				
	454	HINDU				
		a.Peribadatan b.Rumah ibadah c.Tokoh agama, rohaniawan d.Mazhab e.Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	455	BUDHA				
		a.Peribadatan b.Rumah ibadah c.Tokoh agama, rohaniawan d.Mazhab e.Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	456	URUSAN HAJI				
		a.ONH	Biasa/	Eselon	Tidak memiliki	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b.Umroh c.Manasik	Terbuka	III	dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
7	460	<b>SOSIAL</b>				
	461	REHABILITASI PENDERITA CACAT				
		a.Cacat Mata b.Cacat tubuh c.Cacat mental d.Bisu tuli	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	462	TUNA SOSIAL				
		a.Gelandangan b.Pengemis c.Tuna susila d.Anak nakal/anak jalanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	463	KESEJAHTERAAN ANAK/KELUARGA				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
		a.Anak Putus Sekolah b.Ibu teladan c.Keluarga sakinah d.Anak asuh	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	464	PEMBINAAN PAHLAWAN					
		a.Pahlawan b.Perintis kemerdekaan c.Cacat veteran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	465	KESEJAHTERAAN SOSIAL					
		a.Lanjut Usia b.Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	466	SUMBANGAN SOSIAL					
		a.Korban Bencana b.Pencarian Dana untuk c.Sumbangan Panti d.Asuhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Panti Jompo			OPD/unit kerja	
	467	BIMBINGAN SOSIAL Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman untuk masyarakat suku terasing	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	468	PMI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	469	MAKAM				
		a.Umum b.Pahlawan c.Khusus keluarga raja d.Krematorium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>8</b>	<b>470</b>	<b>KEPENDUDUKAN</b>				
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK				
		a. Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon	Memiliki dampak	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Biodata 2) Nomor Induk Kependudukan 3) Kartu Tanda Penduduk 4) Kartu Keluarga 5) Advokasi Identitas Penduduk		III	yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	
		b. Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia 1) Perpindahan penduduk WNI 2) Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia 3) Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4) Daerah terbelakang 5) Bedol desa	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Perpindahan Penduduk Antar Negara 1) Penduduk Indonesia ke luar negeri 2) Orang asing tinggal sementara 3) Orang asing tinggal tetap 4) Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
		tradisional)					
		d.Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan 1)Akibat bencana alam 2)Akibat kerusuhan sosial 3)Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4)Pendaftaran penduduk rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	472	PENCATATAN SIPIL					
		a.Kelahiran, Kematian, dan Advokasi 1)Kelahiran 2)Kematian 3)Advokasi kelahiran dan kematian 4)Perkawinan, perceraian dan advokasi	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		b.Perkawinan Agama Islam 1)Perkawinan agama non Islam 2)Perceraian agama Islam 3)Perceraian agama non Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4)Advokasi perkawinan dan perceraian				
		c.Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi 1)Pengangkatan anak 2)Pengakuan anak 3)Pengesahan anak 4)Perubahan akta 5)Pembatalan akta 6)Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.Pencatatan Kewarganegaraan 1)Akibat perkawinan 2)Akibat kelahiran 3)Non perkawinan 4)Non kelahiran 5)Perubahan WNI ke WNA	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		6)Perubahan WNA ke WNI				
	473	INFORMASI KEPENDUDUKAN				
		a.Teknologi Informasi 1)Perangkat keras 2)Perangkat lunak 3)Jaringan komunikasi data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi 1)Daerah maju 2)Daerah berkembang 3)Daerah terbelakang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.Pengolahan Data Kependudukan 1)Pendaftaran penduduk 2)Kejadian vital penduduk 3)Penduduk non registrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.Pelayanan Informasi Kependudukan 1)Media elektronik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
		2) Media cetak 3) Outlet			mengganggu kinerja OPD/unit kerja		
	474	PERKEMBANGAN PENDUDUK					
		a. Pengarahan Kuantitas Penduduk 1) Struktur jumlah 2) Komposisi 3) Fertilitas 4) Kesehatan reproduksi 5) Morbiditas penduduk 6) Mortalitas penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		b. Pengembangan Kuantitas Penduduk 1) Anak dan remaja 2) Penduduk usia produktif 3) Penduduk lanjut usia 4) Gender	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		c. Penataan Persebaran Penduduk	Biasa/	Eselon	Tidak memiliki	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
		1) Migrasi antar wilayah 2) Migrasi internasional 3) Urbanisasi 4) Sementara 5) Migrasi non permanen	Terbuka	III	dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja		
		d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) Pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) Pelayanan kelembagaan ekonomi 3) Pelayanan kelambagaan sosial budaya 4) Partisipasi masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		e. Pengembangan Wawasan kependudukan 1) Pendidikan jalur sekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikan jalur masyarakat 4) Pembangunan berwawasan kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
475		PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN					

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a. Indikator Kependudukan 1) Perumusan penetapan dan pengembangan indicator kependudukan 2) Pemanfaatan indicator kependudukan 3) Sosialisasi indikator kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Proyeksi Penduduk 1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Analisis Dampak Kependudukan 1) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah 1) Lembaga internasional,	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Lembaga masyarakat dan nirlaba 3) Lembaga usaha swasta			yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		e.Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah 1) Lembaga pemerintah 2) Pemerintah provinsi dan 3) Pemerintah kabupaten	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.Analisis Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	476	MONITORING	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	477	EVALUASI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
	478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	479	KELUARGA BERENCANA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>9</b>	<b>480</b>	<b>MEDIA MASSA</b>				
	481	PENERBITAN 1) Surat kabar 2) Majalah 3) Buku 4) Penerjemahan 5) Buletin 6) Jurnal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		7) Kliping				
	482	RADIO 1) RRI 2) Non RRI 3) Radio luar negeri 4) Radio internet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	483	TELEVISI 1) TVRI 2) Swasta lokal, nasional, 3) Luar negeri 4) Televisi internet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	484	FILM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	485	PERS 1) Kewartawanan,	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2) Wawancara 3) Informasi nasional			mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
	486	GRAFIKA Berkas tentang grafika/cetak buku	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	487	PENERANGAN Berkas tentang pameran non komersil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	488	OPERATION ROOM Berkas tentang operation room terkait media massa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	489	HUBUNGAN MASYARAKAT	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa			dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	

#### VI. PENGAWASAN

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1		PENGAWASAN				
	700	Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	701	Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	702	Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	703	Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	704	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/Kearsipan/Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	705	Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	707	Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	708	Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	709	Bidang Perjalanan Dinas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	711	Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	712	Bidang Pemerintahan Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	713	Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	714	Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		Bidang MPRIDPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	715				dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	716	Bidang DPRD Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	717	Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	718	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	719				dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
<b>2</b>	<b>720</b>	<b>BIDANG POLITIK</b>				
	721	Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	724	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					tugas perangkat daerah unit kerja	
725	-	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
726	-	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
727	-	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					dan tugas perangkat daerah unit kerja	
731	-	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
732	-	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
733	-	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
734	-	Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
735	-	Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
736	-	Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
737	-	Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
731	-	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
732	-	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
733	-	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
734	-	Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
735	-	Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
736	-	Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					kerja	
737	-	Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
741	-	Bidang Pembangunan Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
742	-	Bidang Pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
743	-	Bidang Kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					dan tugas perangkat daerah unit kerja	
744	-	Bidang Kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
745	-	Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
746	-	Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
747	-	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
748	-	Bidang Media Masa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
751	-	Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
752	-	Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
753	-	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					daerah unit kerja	
754	-	Bidang Pertambangan/Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
755	-	Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
756	-	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
757	-	Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
758	-	Bidang Tentang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
			Terbuka		dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
759	-	Bidang Tentang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	760	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>				
761	-	Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
762	-	Bidang Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
763	-	Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					dan tugas perangkat daerah unit kerja	
764	-	Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
765	-	Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
766	-	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
767	-	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
768	-	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH	
			Terbuka		dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja		
769	-	Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
8	780	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>					
781	-	Bidang Pengadaan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
782	-	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
783	-	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					daerah unit kerja	
784	-	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
785	-	Bidang Cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
786	-	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
787	-	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
788	-	Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
788	-	Bidang Pendidikan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
9	790	<b>BIDANG KEUANAGAN</b>				
791	-	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
792	-	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
793	-	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					daerah unit kerja	
794	-	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
795	-	Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
796	-	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
797	-	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
799	-	Bidang Perbendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

#### X. KEUANGAN

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	902	APBN	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	903	APBD, RAPBD -Hibah -Bantuan Sosial	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	904	Dana Alokasi Umum - Berks pengajuan - Penyusunan DAU - Laporan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit ke rja	Sekretariat, Bidang
	905	Dana Alokasi Khusus - Berkas pengajuan - Penggunaan DAK - Laporan - Dana Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	906	Dana Cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
2	910	<b>ANGGARAN</b>				
	911	Rutin/Murni - APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dapat	Sekretariat, Bidang
	912	Pembangunan/Kegiatan - Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan - Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat, Bidang
	913	Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD - Mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat, Bidang
	914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) - Daftar Usulan Kegiatan (DUK) - Pengusulan Pra RKA - Pengusulan RKA - Pembahasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat, Bidang
	915	Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Daftar Usulan Proyek (DUP) - Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	916	Revisi Anggaran/Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD -	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	917	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	918	Belanja langsung/tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
3	920	<b>OTORISASI/SKO/Surat Penyediaan Dana (SPD)</b>				
	921	Rutin/Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	922	Pembangunan/Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					daerah unit kerja	
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	924	Ralat SKO/Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
4	930	<b>VERIFIKASI</b>				
	931	SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	932	SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	933	Penerimaan (Daftar P6. P7)/Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					daerah unit kerja	
	934	SPJ Rutin/SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	935	SPJ Pembangunan/SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
5	940	<b>PEMBUKUAN</b>				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					daerah unit kerja	
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) - Neraca - Catatan anggaran laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)/Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	953	Penghapusan Kekayaan Negara - Aset Daerah - Aset bergerak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
		- Aset tidak bergerak - Aset tidak berwujud			daerah unit kerja	
	954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek / PPTK dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	955	Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	957	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan - Laporan keuangan bulanan - Laporan keuangan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
8	970	PENDAPATAN -Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	972	Subsidi	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH, PBB	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	974	Retribusi	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	975	Bea	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	976	Cukai	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
	977	Pungutan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Propinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	979	Pendapatan Perusahaan Milik Negara/Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
9	980	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
10.	990	BENDAHARAWAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Sekretariat, Bidang

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR KEAMANAN	UNIT PENGOLAH
					dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**